



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis AkruaI, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan



keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2015 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis AkruaI.



1.3 **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**
Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja
 - 3.1.4 Aset
 - 3.1.5 Kewajiban
 - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab V Penutup.



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak mengelola pendapatan.
- 2) Realisasi Belanja sebesar Rp33.492.794.765,00 lebih kecil Rp3.391.493.235,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp36.884.288.000,00 atau tercapai 90,81 persen.
- 3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2021 terjadi defisit sebesar Rp(33.492.794.765,00) Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA) sebesar Rp(33.492.794.765,00).

	APBD Tahun 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja	-	-	
Pendapatan	-	-	-
Belanja dan Transfer	36,884,288,000.00	33,492,794,765.00	3,391,493,235.00
Surplus/(Defisit)	(36,884,288,000.00)	(33,492,794,765.00)	3,391,493,235.00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(36,884,288,000.00)	(33,492,794,765.00)	3,391,493,235.00



Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SIKPA /SILPA Tahun Anggaran 2021 berasal dari sisa anggaran belanja sebesar Rp3.391.493.235,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00.

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Belanja TA.2021 terealisasi 90,81 persen atau sebesar Rp33.492.794.765,00 dibandingkan dengan anggarannya, sebesar Rp36.884.288.000,00.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA.2021 terjadi pada pos Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek terutama pada pos belanja hibah. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Penundaan pelaksanaan program pamsimas reguler dikarenakan kurangnya kesiapan kelompok kerja masyarakat dalam waktu yang terbatas;
2. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Hibah Air Minum Pedesaan karena terkendala dalam mencari sumber air tanah.
3. Kurangnya koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan dan Anggaran.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- D. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir
- E. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- F. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA):

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Daerah pada TA.2021 adalah sebesar Rp33.492.794.765,00 atau 90,81 persen dari jumlah yang dianggarkan



dalam APBD Perubahan TA.2021 sebesar Rp36.884.288.000,00. Realisasi Belanja Daerah TA.2021 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp14.245.993.015,00; Belanja Modal sebesar Rp19.246.801.750,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp33.492.794.765,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2021 sebesar Rp(33.492.794.765,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA.2021 adalah sebesar Rp0,00 Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2021 sebesar Rp(33.492.794.765,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2021 dan realisasi TA. 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Transfer			
Lain-lain Pendapatan Yang Sah			
Jumlah Pendapatan	-	-	
Belanja			
Belanja Oprasi	17,026,212,500.00	14,245,993,015.00	8,796,538,054.00
Belanja Modal	19,858,075,500.00	19,246,801,750.00	10,279,781,356.00
Belanja Tidak Terduga			
Transfer			
Jumlah Belanja	36,884,288,000.00	33,492,794,765.00	19,076,319,410.00
Surplus/(Defisit)	(36,884,288,000.00)	(33,492,794,765.00)	(19,076,319,410.00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(36,884,288,000.00)	(33,492,794,765.00)	(19,076,319,410.00)

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran Adalah sebagai berikut:

3.1.1 BELANJA.....Rp33.492.794.765,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp33.492.794.765,00 yang berarti mencapai 90,81 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp36.884.288.000,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.



Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI.....Rp14.245.993.015,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp14.245.993.015,00 yang berarti mencapai 83,67 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp17.026.212.500,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Hibah dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	1,717,469,600.00	1,639,810,425.00	1,624,714,124.00
Belanja Barang	8,898,742,900.00	8,292,503,590.00	7,171,823,930.00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	8,898,742,900.00	4,313,679,000.00	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	19,514,955,400.00	14,245,993,015.00	8,796,538,054.00

1. Belanja Pegawai.....Rp1.639.810.425,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp1.639.810.425,00 yang berarti mencapai 95,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.717.469.600,00.

Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan	1,717,469,600.00	1,639,810,425.00	95.48	(77,659,175.00)
2	Belanja Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6,621,000.00	-	-	(6,621,000.00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	230,175,600.00	171,570,000.00	74.54	(58,605,600.00)
Jumlah Belanja Pegawai		1,954,266,200.00	1,811,380,425.00	92.69	(142,885,775.00)



- 1) Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.468.240.425,00 atau 99,16 persen dari anggarannya sebesar Rp1.480.673.000,00. Rincian Belanja Pegawai secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1,069,863,000.00	1,068,095,320.00	99.83	1,767,680.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122,618,000.00	121,038,072.00	98.71	1,579,928.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	131,656,000.00	129,170,000.00	98.11	2,486,000.00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21,803,000.00	22,405,000.00	102.76	(602,000.00)
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	69,243,000.00	68,074,800.00	98.31	1,168,200.00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,816,000.00	4,547,189.00	78.18	1,268,811.00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,000.00	15,950.00	93.82	1,050.00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50,098,000.00	46,220,151.00	92.26	3,877,849.00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,390,000.00	2,168,483.00	90.73	221,517.00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7,169,000.00	6,505,460.00	90.74	663,540.00
Jumlah Tambahan Penghasilan PNS		1,480,673,000.00	1,468,240,425.00	99.16	12,432,575.00

- 2) Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp171.570.000,00 atau 72,45,00 persen dari anggarannya sebesar Rp236.796.000,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tambahan Penghasilan PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
4	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6,621,000.00	-	-	(6,621,000.00)
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	230,175,600.00	171,570,000.00	74.54	(58,605,600.00)



2. Belanja Barang dan Jasa.....Rp8.292.503.590,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar 8.292.503.590,00 yang berarti mencapai 93,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.898.742.900,00.

No.	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Barang	777,398,150.00	726,817,700.00	93.49	(50,580,450.00)
2	Belanja Jasa	2,817,401,750.00	2,466,415,056.00	87.54	(350,986,694.00)
3	Belanja Pemeliharaan	65,440,000.00	59,516,100.00	90.95	(5,923,900.00)
4	Belana Perjalanan Dinas	545,053,000.00	346,304,734.00	63.54	(198,748,266.00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,693,450,000.00	4,693,450,000.00	100.00	-
Jumlah Belanja Barang		8,898,742,900.00	8,292,503,590.00	93.19	(606,239,310.00)

1. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp726.817.700,00 atau 93,49 persen dari anggarannya sebesar Rp777.398.150,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Barang Pakai Habis	777,398,150.00	726,817,700.00	93.49	(50,580,450.00)
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis		777,398,150.00	726,817,700.00	93.49	(50,580,450.00)

2. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp2.466.415.056,00 atau 87,54 persen dari anggarannya sebesar Rp2.817.401.750,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Kantor	1,971,617,750.00	1,673,596,056.00	84.88	- 298,021,694.00
2	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	433,450,000.00	412,085,000.00	95.07	- 21,365,000.00
3	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	225,000,000.00	216,182,000.00	96.08	- 8,818,000.00
4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	187,334,000.00	164,552,000.00	87.84	- 22,782,000.00
	Belanja Jasa	2,817,401,750.00	2,466,415,056.00	87.54	(350,986,694.00)

3. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp59.516.100,00 atau 90,95 persen dari anggarannya sebesar Rp65.440.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,440,000.00	59,516,100.00	90.95	(5,923,900.00)
	Belanja Pemeliharaan	65,440,000.00	59,516,100.00	90.95	(5,923,900.00)

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp346.304.734,00 atau 63,54 persen dari anggarannya sebesar Rp545.053.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belana Perjalanan Dinas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	545,053,000.00	346,304,734.00	63.54	(198,748,266.00)
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	545,053,000.00	346,304,734.00	63.54	(198,748,266.00)

5. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebesar Rp4.693.450.000,00 atau 100 persen dari anggarannya sebesar Rp4.693.450.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



No.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,693,450,000.00	4,693,450,000.00	100.00	-
	Jumlah Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,693,450,000.00	4,693,450,000.00	100.00	-

3. Belanja Hibah.....Rp4.313.679.000,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak ada Belanja Hibah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar 4.313.679.000,00 yang berarti mencapai 67,30 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.410.000.000,00.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	910,000,000.00	-	-	(910,000,000.00)
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5,500,000,000.00	4,313,679,000.00	78.43	(1,186,321,000.00)
Jumlah Belanja Hibah		6,410,000,000.00	4,313,679,000.00	67.30	(2,096,321,000.00)

4. Belanja Bantuan Sosial.....Rp0,00
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tidak ada Belanja Bantuan Sosial.

2. BELANJA MODAL.....Rp19.246.801.750,00
Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp19.246.801.750,00 atau 96,92 persen dari anggarannya sebesar Rp19.858.075,00. Realisasi belanja modal terdiri dari:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,133,000.00	75,896,400.00	99.69	(236,600.00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,510,977,500.00	5,374,153,000.00	97.52	(136,824,500.00)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14,270,965,000.00	13,796,752,350.00	96.68	(474,212,650.00)
Jumlah Belanja Modal		19,858,075,500.00	19,246,801,750.00	96.92	(611,273,750.00)



- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.896.400,00 atau 99,69 persen dari anggarannya sebesar Rp76.133.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Komputer Unit	72,366,000.00	72,130,000.00	99.67	-236,000.00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	3,767,000.00	3,766,400.00	99.98	-600.00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,133,000.00	75,896,400.00	99.69	(236,600.00)

- 2) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.374.153.000,00 atau 97,52 persen dari anggarannya sebesar Rp5.510.977.500,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5,510,977,500.00	5,374,153,000.00	97.52	(136,824,500.00)
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,510,977,500.00	5,374,153,000.00	97.52	(136,824,500.00)

- 3) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.050.371.356,00 atau 94,81 persen dari anggarannya sebesar Rp10.601.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3,865,270,000.00	3,793,410,409.00	98.14	(71,859,591.00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	10,210,020,000.00	9,812,095,941.00	96.10	(397,924,059.00)
3	Belanja Modal Instalasi	195,675,000.00	191,246,000.00	97.74	(4,429,000.00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		14,270,965,000.00	13,796,752,350.00	96.68	(474,212,650.00)

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada tahun anggaran 2021 belanja yang menghasilkan aset berasal dari belanja modal sebesar Rp19.246.801.750,00 tidak ada kapitalisasi dari belanja pegawai maupun kapitalisasi dari belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp0,00. Dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00 dan belanja aset dengan nilai dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp0,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Belanja Modal	Dihilangkan	Tidak Dikapitalisasi	Dibawah Nilai Kapitalisasi
Belanja Modal Tanah	-	-	686,713,850.00	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	2,471,805,141.38	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	1,904,866,084.00	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	107,796,575,642.80	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	39,675,979,499.16	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	152,535,940,217.34	-	-	-



3. **BELANJA TIDAK TERDUGA.....Rp0,00**
 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak mengelola Belanja Tidak Terduga.
4. **TRANSFER Rp0,00**
 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada transfer.
5. **PEMBIAYAAN NETTO..... Rp0,00**
 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Pembiayaan Netto.
6. **Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran(SIKPA) Rp(33.492.794.765,00)**

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp(33.492.794.765,00) dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2021 sebesar Rp(36.884.288.000,00), dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	-	-	-
	Belanja dan Transfer	(36,884,288,000.00)	(33,492,794,765.00)	(19,076,319,410.00)
	Surplus/(Defisit)	36,884,288,000.00	33,492,794,765.00	19,076,319,410.00
2	Pembiayaan	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	36,884,288,000.00	33,492,794,765.00	19,076,319,410.00

Dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp36.884.288.000,00 realisasinya sebesar Rp33.492.794.765,00 sehingga terdapat sisa anggaran/sisa belanja sebesar Rp3.391.493.235,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

- a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2.780.219.485,00 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp77.659.175,00 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp19.053.575,00.
- b) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp58.605.600,00.
- 2) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Barang sebesar Rp606.239.310,00 untuk pelaksanaan kegiatan, yaitu:
 - a) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Barang sebesar Rp50.580.450,00.
 - b) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Jasa sebesar Rp350.986.694,00.
 - c) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.923.900,00
 - d) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp198.748.266,00
 - e) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebesar Rp0,00
- 3) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Hibah sebesar Rp2.096.321.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan, yaitu:
 - a) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp2.096.321.000,00
- b. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Modal sebesar Rp611.273.750,00 untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - 1) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp236.600,00
 - 2) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Bangunan dan Gedung Pengadaan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp136.824.500,00
 - 3) Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pengadaan Jalan sebesar Rp474.212.650,00



B. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2021.

1. PENDAPATAN-LO.....Rp2.198.065.602,86,00

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2021 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan-LO	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	2,198,065,602.86	12,184,941,000.00	(9,986,875,397.14)
4	Suprlus Non Operasional-LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan-LO		2,198,065,602.86	12,184,941,000.00	(9,986,875,397.14)



Realisasi pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp2.198.065.602,86,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.986.875.397,14,00 atau 81,96 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2020.

a) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO....Rp2.198.065.602,86

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah LO tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	2,198,065,602.86	12,184,941,000.00	(9,986,875,397.14)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		2,198,065,602.86	12,184,941,000.00	(9,986,875,397.14)

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp2.198.065.602,86 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.986.875.397,14 atau 81,96 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020.

Adanya hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan nomor: 056.7/BA/DC/2021, 028/1383/2021 pada tanggal 22 September 2021 terdiri dari:

1. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp212.137.185,00.
2. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp1.133.057.200,00
3. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp2.015.950.338,00.



2. BEBAN-LO.....Rp53.927.068.817,07

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	53,927,068,817.07	39,970,481,606.52	13,956,587,210.55
2	Beban Transfer	.	.	.
3	Defisit Non Operasional	.	.	.
4	Beban Luar Biasa	.	.	.
	Jumlah	53,927,068,817.07	39,970,481,606.52	13,956,587,210.55

Beban-LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.956.587.210,55 atau 34,92 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2020. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

2.1 Beban Operasi.....Rp39.970.481.606,52

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2021 sebesar Rp39.970.481.606,52 mengalami kenaikan sebesar Rp13.956.587.210,55 atau 34,92 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
a	Beban Pegawai - LO	1,527,359,867.00	1,594,609,124.00	(67,249,257.00)
b	Beban Persediaan	727,815,700.00	367,310,800.00	360,504,900.00
	Beban Jasa	1,957,097,399.00	1,033,765,911.00	923,331,488.00
	Beban Pemeliharaan	59,516,100.00	1,093,955,575.00	(1,034,439,475.00)
	Beban Perjalanan Dinas	346,304,734.00	300,771,614.00	45,533,120.00
c	Beban Bunga	-	-	-
d	Beban Subsidi	-	-	-
e	Beban Hibah	19,197,644,000.00	7,031,225,000.00	12,166,419,000.00
f	Beban Bantuan Sosial	1,260,000,000.00	-	1,260,000,000.00
g	Beban Penyusutan dan Amortisasi	28,851,331,017.07	28,548,843,582.52	302,487,434.55
h	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
i	Beban Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	53,927,068,817.07	39,970,481,606.52	13,956,587,210.55

- a. **Beban Pegawai-LO** tahun 2021 sebesar Rp1.594.609.124,00 mengalami Penurunan sebesar Rp67.249.257,00 atau 4,22 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji Pokok ASN	1,068,095,320.00	1,174,524,520.00	(106,429,200.00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	121,038,072.00	134,696,662.00	(13,658,590.00)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	130,789,950.00	137,940,000.00	(7,150,050.00)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	154,900.00	0.00	154,900.00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,405,000.00	22,775,000.00	(370,000.00)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	68,074,800.00	63,005,400.00	5,069,400.00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,550,681.00	1,652,423.00	2,898,258.00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	16,050.00	17,315.00	(1,265.00)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46,291,151.00	50,347,772.00	(4,056,621.00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,168,483.00	9,650,032.00	(7,481,549.00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6,505,460.00	-	6,505,460.00
12	Beban Honorarium	57,270,000.00	-	57,270,000.00
	Jumlah	1,527,359,867.00	1,594,609,124.00	(67,249,257.00)

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.639.810.425,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp1.594.609.124,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp112.450.558,00 terdiri dari Belanja Pegawai yang direklas ke belanja Modal sebesar Rp114.300.000,00 dan terdapat Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.849.442,00 sebagai pengurang belanja pegawai tersebut di atas.

- b. **Beban Barang dan Jasa** tahun 2021 sebesar Rp2.795.803.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.090.733.933,00 atau 90,46 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2020 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Beban Barang dan Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1	Beban Persediaan	727,815,700.00	367,310,800.00	360,504,900.00
2	Beban Jasa	1,957,097,399.00	1,033,765,911.00	923,331,488.00
3	Beban Pemeliharaan	59,516,100.00	1,093,955,575.00	(1,034,439,475.00)
4	Beban Perjalanan Dinas	346,304,734.00	300,771,614.00	45,533,120.00
	Jumlah	3,090,733,933.00	2,795,803,900.00	294,930,033.00

1) Beban Persediaan – LO..... Rp727.815.700,00

Beban Persediaan TA. 2021 sebesar Rp727.815.700,00 lebih besar Rp360.504.900,00 atau 98,15 persen dibandingkan Beban Persediaan TA. 2020 sebesar Rp367.310.800,00. Beban Persediaan terdiri dari :

Beban Persediaan :	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46,796,500	-	46,796,500.00	0.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	130,116,000	-	130,116,000.00	0.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129,782,200.00	206,074,300.00	-76,292,100.00	-37.02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	33,936,000	-	33,936,000.00	0.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,895,000	4,890,000	-1,995,000.00	-40.80
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23,850,000	-	23,850,000.00	0.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21,919,000	27,975,000	-6,056,000.00	0.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,820,000	7,552,000	-2,732,000.00	-36.18
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12,800,000	7,500,000	5,300,000.00	70.67
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	186,406,500	-	186,406,500.00	0.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	106,754,500	81,869,500	24,885,000.00	30.40
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27,740,000.00	31,450,000	-3,710,000.00	-11.80
Jumlah Beban Jasa Kantor	727,815,700.00	367,310,800.00	360,504,900.00	98.15



Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp, 726.817.700,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp727.815.700,00. Terdapat selisih antara Belanja Persediaan-LRA dengan Beban Persediaan-LO sebesar Rp998.000,00 dikarenakan adanya :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2020 berupa Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp8.332.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.496.000,00 terdapat selisih Rp3.836.000,00
2. Persediaan akhir tahun 2020 berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp42.000,00 sedang pada Tahun 2021 sebesar Rp2.880.000,00 terdapat selisih Rp-2.838.000,00.

2) Beban Jasa – LO.....Rp1.957.097.339,00

Beban Jasa Kantor sebesar Rp1.957.097.339,00 lebih tinggi Rp923.331.488,00 atau 89,23 persen dari Beban Jasa Kantor TA. 2020 sebesar Rp1.033.765.911,00. Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban Jasa :	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4,800,000	-	4,800,000.00	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6,000,000	-	6,000,000.00	-
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89,040,000	-	89,040,000.00	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39,150,000	20,350,000	18,800,000.00	92.38
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	42,000,000	-	42,000,000.00	-
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	99,850,000	-	99,850,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	183,500,000	123,000,000	60,500,000.00	0.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3,750,000	-	3,750,000.00	0.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	216,108,750	340,681,250	-124,572,500.00	0.00
Beban Jasa Tenaga Ahli	462,737,000	220,010,000	242,727,000.00	0.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	23,437,500	-	23,437,500.00	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	45,625,000.00	-	45,625,000.00	-
Beban Jasa Tenaga Supir	5,218,750.00	-	5,218,750.00	-
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	151,200,000.00	79,606,250.00	71,593,750.00	89.93
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	324,000.00	-	324,000.00	-
Beban Tagihan Telepon	500,770.00	546,840.00	-46,070.00	-8.42
Beban Tagihan Air	6,934,000.00	5,991,400.00	942,600.00	15.73
Beban Tagihan Listrik	63,221,393.00	82,149,195.00	-18,927,802.00	-23.04
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8,820,000.00	5,890,000.00	2,930,000.00	0.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31,009,236.00	34,176,976.00	-3,167,740.00	-9.27
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0.00	-	0.00	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	93,137,000.00	-	93,137,000.00	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0.00	-	0.00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	216,182,000.00	-	216,182,000.00	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	126,800,000.00	121,364,000.00	5,436,000.00	4.48
Beban Sosialisasi	37,752,000.00	-	37,752,000.00	-
Jumlah Beban Jasa Kantor	1,957,097,399.00	1,033,765,911.00	923,331,488.00	89.32

Belanja Jasa -LRA sebesar 2,466,415,056,00 sedangkan Beban Jasai-LO sebesar Rp1.957.097.399,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp509.317.657,00. Dikarenakan adanya:

1. Adanya Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp525.100 sedangkan Utang Beban Barang & Jasa Tahun Sebelumnya Yg dibayar di 2021 sebesar Rp9.694.757 sehingga terdapat selisih Rp9.169.657,00



2. Adanya Belanja Pegawai dan Barang Jasa Yg Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp500.148.000,00 terdiri dari:

- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp 36.750.000,00.
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sebesar Rp 54.750.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp89.700.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp247.048.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp71.900.000,00

3). Beban Pemeliharaan – LO..... Rp59.516.100,00

Beban Pemeliharaan TA. 2021 sebesar Rp59.516.100,00 lebih rendah sebesar Rp1.034.439.475,00 atau 94,56 persen dari Beban Pemeliharaan TA. 2020 sebesar Rp1.093.955.575,00. Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan :	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	39,380,000	-39,380,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	1,000,166,000	-1,000,166,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	18,876,000	-18,876,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	4,125,000	-4,125,000.00	0
Beban Jasa Service	-	12,393,000	-12,393,000.00	-100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	-	11,877,000	-11,877,000.00	-100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	7,138,575	-7,138,575.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33,602,100	-	33,602,100.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25,914,000	-	25,914,000.00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	59,516,100.00	1,093,955,575.00	-1,034,439,475.00	-94.56

Belanja Pemeliharaan -LRA sebesar Rp59.516.100,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp59.516.100,00 tidak terdapat selisih antara LRA dengan Laporan Operasional (LO).



4). Beban Perjalanan Dinas – LO..... Rp346.304.734,00

Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 sebesar Rp346.304.734,00 lebih rendah 45.533.120,00 atau 15,14 persen dari Beban Perjalanan Dinas TA. 2020 sebesar Rp.300.771.614,00.

Beban Perjalanan dinas :	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan)	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71,652,218.00	100,963,000.00	-29,310,782.00	-29.03
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	274,652,516.00	199,808,614.00	74,843,902.00	37.46
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	346,304,734.00	300,771,614.00	45,533,120.00	15.14

Belanja Perjalanan Dinas -LRA sebesar Rp346.304.734,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp346.304.734,00 tidak terdapat selisih antara LRA dengan Laporan Operasional (LO).

c. Beban bunga Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Beban Bunga tahun 2021

d. Beban Subsidi Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Beban Subsidi tahun 2021 .

e. Beban Hibah Rp19.197.644.000,00

Beban Hibah TA. 2021 sebesar Rp19.197.644.000,00 lebih rendah sebesar Rp12.166.419.000,00 atau 173,03 persen dari Beban Hibah TA. 2020 sebesar Rp7.031.225.000,00.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Hibah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1	Beban Hibah kepada Kelompok Bidang Perekonomian	-	7,031,225,000.00	-
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5,646,484,000.00	-	5,646,484,000.00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3,433,450,000.00	-	3,433,450,000.00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10,117,710,000.00	-	10,117,710,000.00
Jumlah Hibah		19,197,644,000.00	7,031,225,000.00	12,166,419,000.00

Belanja Hibah -LRA sebesar Rp4.313.679.000,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp19.197.644.000,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp14.833.965.000,00 terdiri dari:

- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp 3.433.450.000,00. Beban Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan merupakan hibah yang bersumber dari APBN (kementrian PUPR) dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan Tangki septik skala komunal (5-10 kk) di delapan (delapan) kecamatan dan masing kecamatan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp343.450.000,00
- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 5.646.484.000,00 yaitu terdiri dari:
 - Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Purwodadi berupa Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi sebesar Rp903.255.000 berdasarkan NPHD no 030/8043/XI/2021, Nomor NPHD-2177/M.3.41/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021
 - Pembangunan Lapangan Tenis Kodim berupa Lapangan Tenis Kodim sebesar Rp882.115.000 berdasarkan NPHD nomor 030/7731/XI/2021, Nomor B/60/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021.
 - Pembangunan Polsek (Pembangunan Gedung Mapolsek Geyer) berupa Gedung kantor polsek Geyer sebesar Rp2.023.080.000 berdasarkan NPHD nomor



030/8041/XI/2021, nomor NPHD/1144/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021.

- Pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwodadi berupa Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwodadi sebesar Rp899.186.000 berdasarkan NPHD nomor 030/7922/XI/2021, nomor W12.U16/1781/PL.01/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021.
 - Peningkatan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Purwodadi berupa Rumah Dinas Pengadilan Purwodadi sebesar Rp938.848.000 berdasarkan NPHD no 030/7923/XI/2021, nomor W11-A3/3449/PL.01/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021.
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp5.804.031.000,00. Yang terdiri dari 22 Desa di 13 kecamatan yaitu:
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bago Kec. Kradenan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp284.443.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.7/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Boloh Kec. Toroh (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 240.400.000 berdasarkan NPHD no030/8494/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Curut Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 290.700.000 berdasarkan no030/8514/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dapurno Kec. Wirosari (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 286.643.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.5/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gunung Tumpeng Kec. Karangrayung (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp292.227.000 berdasarkan NPHD no 030/8496/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Juworo Kec. Geyer (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.930.000 berdasarkan NPHD no 030/8502/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021



- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kebonagung Kec. Tegowanu (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp288.913.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.3/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Keyongan Kec. Gabus (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp326.652.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.9/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kramat Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp290.890.000 berdasarkan NPHD no 030/7561/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lemahputih Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.307.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Leyangan Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp290.700.000 berdasarkan NPHD no 030/8512/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggarwetan Kec. Godong (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp293.080.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.13/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pahesan Kec. Godong (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.080.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.11/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pojok Kec. Tawangharjo (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.460.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.18/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Randurejo Kec. Pulokulon (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp333.200.000 berdasarkan NPHD no 030/8488/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sambirejo Kec. Wirosari (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.678.000 berdasarkan NPHD no 030/8516/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanjungsari Kec. Kradenan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air,



- jaringan perpipaan sebesar Rp199.580.000 berdasarkan NPHD no 030/8492/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegalsumur Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp292.700.000 berdasarkan NPHD no 030/8500/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Teguhan Kec. Grobogan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.412.000 berdasarkan NPHD no 030/8521/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Temon Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.110.000 berdasarkan NPHD no 8520.9/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuko Kec. Pulokulon (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp293.519.000 berdasarkan NPHD no 030/8490/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tunggak Kec. Toroh (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.111.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.11/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sambongbangi Kec. Kradenan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.111.000 berdasarkan NPHD no 030/8486/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021.
- a) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dari belanja Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp1.176.288.000 atau 58,81 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp2.000.000.000 yang diserahkan di 6 (enam) desa terdiri dari:
- Hibah Air Minum Perdesaan Desa Tajemsari Kec. Tegowanu (104 SR) berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air minum sebesar Rp188.601.000 berdasarkan NPHD no 030/8518/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021
 - Hibah Air Minum Perdesaan Desa Tlogotirto Kec. Gabus (98 SR) berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air minum sebesar Rp191.689.000 berdasarkan NPHD no 030/8504/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021
 - Hibah Air Minum Perdesaan Desa Kopek Kec. Godong (88 SR) berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air



- minum sebesar Rp193.572.000 berdasarkan NPHD no 030/8498/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Hibah Air Minum Perdesaan Desa Termasi Kec. Karangrayung (90 SR berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air minum sebesar Rp192.492.000 berdasarkan NPHD no 030/8510/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Hibah Air Minum Perdesaan Desa Glapan Kec. Gubug (128 SR) berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air minum sebesar Rp212.216.000 berdasarkan NPHD no 030/8565/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 - Hibah Air Minum Perdesaan Desa Kunjeng Kec. Gubug (109 SR) berupa Sambungan Rumah (SR) dan Pipa distribusi air minum sebesar Rp191.167.000 berdasarkan NPHD no 030/8519/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- b) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) sebesar Rp3.064.382.000 atau 87,55 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp3.500.000.000.
- Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Katekan Kec. Brati berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp 429.659.000 berdasarkan NPHD no 030/8644/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
 - Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Temurejo Kec. Karangraung berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp734.964.000 berdasarkan NPHD no 030/8614/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021
 - Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Kalirejo Kec. Wirosari berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp435.764.000 berdasarkan NPHD no 030/8646/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
 - Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Dimoro Kec. Toroh berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp 599.071.000 berdasarkan NPHD no 030/8508/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Jatilor; berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp310.965.000 berdasarkan NPHD no 030/8649/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
 - Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Tinanding Kec. Godong berupa Kloset dan Bak Resapan



sebesar Rp97.177.000 berdasarkan NPHD no 030/8648/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021

- Pembangunan Sanitasi Air Limbah Setempat (Individual) Ds. Mrisi Kec. Tanggunharjo berupa Kloset dan Bak Resapan sebesar Rp536.342.000 berdasarkan NPHD no 030/8506/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

f. Beban Bantuan Sosial Rp1.260.000.000,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp1.260.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2020. Beban hibah bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga merupakan hibah yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah dana tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di 4 (empat) kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 15 Unit 2. Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi 16 Unit 3. Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi 16 Unit 4. Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi 16 Unit.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 Rp28.851.331.017,07

Beban penyusutan dan Amortisasi TA. 2021 sebesar Rp28.851.331.017,07 lebih rendah sebesar Rp302.487.434 atau 1,06 persen dari Beban penyusutan dan Amortisasi TA. 2020 sebesar Rp28.548.843.582,52.

h. Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp0,00.

i. Beban Lain-lainRp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Beban lain-lain tahun 2021 sebesar Rp0,00.

2.2 Beban Luar Biasa.....Rp0,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terdapat pada SKPD DPPKAD selaku PPKD yang merupakan belanja tidak terduga di LRA. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Beban Luar Biasa.

SURPLUS/(DEFISIT)-LO.....Rp(51.729.003.214,21)

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2020, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir.

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	390,146,701,196.00	445,585,462,582.67
SURPLUS/DEFISIT-LO	-51,729,003,214.21	-27,785,540,606.52
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi ekuitas	1,379,127,916.00	-46,729,540,189.36
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	33,492,794,765.00	19,076,319,410.00
EKUITAS AKHIR	373,289,620,662.79	445,585,462,582.67

1. Ekuitas AwalRp390.146.701.196,80

Ekuitas awal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp390.146.701.196,80 berasal dari Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021.

2. Surplus/Defisit LO.....Rp51.729.003.214,21

Surplus/Defisit LO pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp51.729.003.214,21 berasal dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp2.198.065.602,86 dengan Beban sebesar Rp53.927.068.817,07.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

a. Koreksi Nilai PiutangRp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 .

b. Koreksi Nilai Aset TetapRp0,00



Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 terdapat Koreksi Aset tetap sebesar Rp0,00

- c. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....Rp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 tidak terdapat Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

- d. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek.....Rp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 tidak terdapat Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0,00

- e. Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD.....Rp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 terdapat Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp0,00 tidak Koreksi Ekuitas Mutasi Jangka Pendek.

- f. Koreksi ekuitas lainnya.....Rp0,00

Koreksi ekuitas lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,729,516,379.29
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	467,297,301.43
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	193,923,446,682.70
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	8,396,830,477.00
5	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	
	Jumlah A	205,517,090,840.42

.Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi mengenai Perhitungan Beban Penyusutan dari Tahunan menjadi Bulanan.

- 4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.....Rp33.492.794.765,00**

Akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan (R/K PPKD) menggambarkan transfer aset dari Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2021. R/K adalah akun resiprokal (*reciprocal account*) antara Pemerintah Kabupaten dengan SKPD,. Akun “Rekening Koran-PPKD” ini akan



bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke PEMDA (seperti penyetoran uang ke PEMDA). Selama tahun 2021, jumlah R/K PPKD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp33.492.794.765,00.

5. Ekuitas Akhir.....Rp373.289.620.663,58

Ekuitas akhir sebelum dikonsolidasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp373.289.620.663,58 merupakan hasil dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/(defisit) LO kemudian ditambah dengan koreksi ekuitaslainnya ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.



C. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lancar	7,376,000.00	8,374,000.00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	373,184,750,205.58	390,156,395,953.80
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	99,869,000.00	99,869,000.00
Jumlah Aset	373,291,995,205.58	390,156,395,953.80
Kewajiban Jangka Pendek	2,374,542.00	9,694,757.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	2,374,542.00	9,694,757.00
Jumlah Ekuitas	373,289,620,663.58	390,146,701,196.80
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	373,291,995,205.58	390,156,395,953.80

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3 ASET.....Rp373.184.750.205,58

Nilai Aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2020 sebesar Rp373.184.750.205,58 sedangkan nilai asset per 31 Desember 2021 sebesar Rp390.048.152.953,80. Adapun mutasi dari asset tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Aset Lancar.....Rp7.376.000,00

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat diperinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Lancar	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3 Investasi Jangka Pendek	-	-
4 Piutang Pajak	-	-
5 Penyisihan Piutang Pajak	-	-
6 Piutang Retribusi	-	-
7 Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
8 Piutang Lainnya	-	-
9 Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
10 Persediaan	7,376,000.00	8,374,000.00
Jumlah	7,376,000.00	8,374,000.00

1. Kas.....Rp0,00

Saldo kas pada Neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Dana Bos. Kas pada Neraca tersebut dapat diperincian sebagai berikut:

Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara Dana BOS	-	-
Jumlah	-	-

a) Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2021. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,00, adapun pada tahun 2021 saldo kas di bendahara pengeluaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman Kabupaten Grobogan sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut:

DPPKAD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	DPPKAD	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
Jumlah	-	-



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berupa pungutan pajak penghasilan yang belum disetorkan ke kas Negara/Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2021 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 yaitu sisa lebih dari belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah (bagian dari SILPA).

b) Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp0,00

Pada tahun 2020 kas bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020 merupakan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Atas kas bendahara penerimaan tahun 2020 tersebut telah diakui sebagai realisasi pendapatan LRA tahun 2020. Tahun 2021 kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 yang berupa setoran/pungutan retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 terdiri

Dari:

No	OPD	Nilai	Ket
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	
2	.dst...		
3			
4			
Jumlah			

Kas bendahara penerimaan tahun 2021 tersebut diatas telah diakui sebagai pendapatan LRA tahun 2021.

2. Piutang Pajak.....Rp0,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Secara keseluruhan piutang pajak pada tahun 2021 telah dibayar sebesar Rp0,00 sementara pada tahun 2020 juga terdapat penambahan piutang pajak sebesar Rp0,00 sehingga saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.



3. Piutang Retribusi.....Rp0,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2020 piutang retribusi tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebelum penyisihan adalah sebesar Rp0,00. Selanjutnya atas piutang tersebut dilakukan perhitungan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar *Net Realizable Value* nya. Penyisihan piutang didasarkan pada klasifikasi Kualitas lancar dengan umur piutang 1 bulan, Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, Kualitas diragukan dengan umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 12 bulan. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD	31-Des-19	mutasi tahun 2020		31-Des-19	Penyisihan Piutang
		bertambah	berkurang		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
Piutang Retribusi pesampahan dan kebersihan	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-

4. Piutang Lainnya Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tidak terdapat piutang lainnya.

5. Persediaan.....Rp7.376.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Jumlah persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.374.000,00 (di isi dengan nilai persediaan di neraca komparasi/2020 audited) sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp7.376.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



<i>Persediaan</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1 ATK/Pakai Habis	7,376,000.00	8,374,000.00
2 Barang yang akan diserahkan kepada pihak masyarakat	-	-
3 Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	-	-
4 cetak	-	-
5 Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	-
Jumlah	7,376,000.00	8,374,000.00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Persediaan yang tercantum pada Neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebesar Rp7.376.000,00 diatas tidak termasuk persediaan yang dalam kondisi rusak serta telah kadaluarsa dengan nilai Rp0,00. Selanjutnya atas barang tersebut akan dilakukan pemusnahan.

B. Investasi Jangka Panjang.....Rp0,00
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tidak terdapat piutang lainnya.

C. Aset Tetap..... Rp373.184.750.205,58
Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2021 sebesar Rp373.184.750.205,58.



Aset Tetap sebesar Rp373.184.750.205,58 tersebut, terdiri dari Tanah sebesar Rp200.547.600.556,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.112.906.403,00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.443.728.761,00; Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp362.259.721.799,00; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.337.883.527,00; Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,00 serta akumulasi penyusutan sebesar Rp(205.517.090.840,42). Rinciannya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap:	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi bersih (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	200,547,600,556.00	(1,377,212,956.00)	199,170,387,600.00
Peralatan dan Mesin	3,112,906,403.00	(69,850,400.00)	3,043,056,003.00
Gedung dan Bangunan	2,443,728,761.00	(100,167,000.00)	2,343,561,761.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	362,259,721,799.00	(11,594,316,073.00)	350,665,405,726.00
Aset Tetap Lainnya	10,337,883,527.00	0.01	10,337,883,527.01
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(205,517,090,840.42)	30,004,949,177.21	(175,512,141,663.21)
	<u>373,184,750,205.58</u>	<u>(13,141,546,429.00)</u>	<u>390,048,152,953.80</u>

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp(13.141.546.429,00) terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp33.584.409.179,00 dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp20.442.862.750,00 Selain mutasi bersih aset tetap sebesar Rp(13.141.546.429,00) tersebut ada juga mutasi bersih dari Aset Lainnya yaitu sebesar Rp239.392.805,00 terdiri atas Aset tak berwujud sebesar Rp103.287.400,00 dan Aset Lain-lain (barang yang rusak berat) sebesarRp704.115.065,00 dikurangi akumulasi Rp(704.115.065,00) jadi harga perolehannya Rp0,00

Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut terdiri atas:



NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja	19,246,801,750.00
2	Penerimaan aset dari donasi/hibah	3,361,144,723.00
3	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	-
4	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	614,448,000.00
5	koreksi pembukuan	1,377,212,956.00
6	Reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset	8,984,801,750.00
	Jumlah	33,584,409,179.00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghapusan aset tetap	-
2	Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat	-
3	Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi	
4	Mutasi ke SKPD lain	7,546,000.00
5	Reklasifikasi keluar ke akun lain yang tidak mengubah jumlah total aset tetap	8,984,801,750.00
6	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	11,450,515,000.00
7	Pengurangan karena validasi lainnya	-
	Jumlah	20,442,862,750.00



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	75,896,400.00	5,374,153,000.00	13,796,752,350.00	-	-	19,246,801,750.00
2. Dari Hibah	-	-	-	3,361,144,723.00	-	-	3,361,144,723.00
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-	1,500,000.00	372,498,000.00	240,450,000.00	-	-	614,448,000.00
5. Reklasifikasi	-	3,766,400.00	924,864,000.00	8,056,171,350.00	-	-	8,984,801,750.00
6. Koreksi pembukuan	1,377,212,956.00	-	-	-	-	-	1,377,212,956.00
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	1,377,212,956.00	81,162,800.00	6,671,515,000.00	25,454,518,423.00	-	-	33,584,409,179.00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	7,546,000.00	-	-	-	-	7,546,000.00
5. Reklasifikasi	-	3,766,400.00	924,864,000.00	8,056,171,350.00	-	-	8,984,801,750.00
6. Koreksi pembukuan	-	-	5,646,484,000.00	5,804,031,000.00	-	-	11,450,515,000.00
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	11,312,400.00	6,571,348,000.00	13,860,202,350.00	-	-	20,442,862,750.00
Jumlah mutasi bersih	1,377,212,956.00	69,850,400.00	100,167,000.00	11,594,316,073.00	-	-	13,141,546,429.00

C.1 Tanah.....Rp200.547.600.556,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca tahun 2020 tercatat nilai tanah sebesar



Rp199.170.387.600,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai tanah tersebut naik menjadi Rp200.547.600.556,00. Adanya penambahan harga sertifikat tanah jalan lingkungan tahun 2020 dengan luas tanah 506.074 M2 serta jumlah bidang 672 sebesar Rp1.259.280.730,00 dan Tanah Jalan lingkungan Tahun 2021 dengan luas tanah 171.817 M2 serta jumlah bidang 282 sebesar Rp117.932.226,00 dilampiri dengan berita Acara nomor 028/2630/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo awal (Neraca Th. 2020)	199,170,387,600.00
Penambahan Tanah:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	1,377,212,956.00
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	1,377,212,956.00
Pengurangan Tanah:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	1,377,212,956.00
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	200,547,600,556.00

C.2 Peralatan dan Mesin..... Rp3.112.906.403,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang



dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, komputer,. Pada tahun 2020 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca tercatat sebesar Rp3.043.056.003,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp3.112.906403,00. Terdapat Reklas Dari Peralatan personal komputer ke alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp3.766.400,00 dan Adanya Mutasi Keluar Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan berupa Alat Komputer note book merk/type Asus A455L/blu black/intel CORE i3 Tahun Perolehan 2016 dengan harga Perolehan sebesar Rp7.546.000 yang di gunakan oleh Ibu Siti Makrifatul Aminah, SH, MH berdasarkan Berita Acara nomor: 028/113.B/2021 pada tanggal 5 April 2021.

Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2020)	3,043,056,003.00
Penambahan Peralatan dan Mesin:	
1. Dari belanja	75,896,400.00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	1,500,000.00
5 Reklasifikasi	3,766,400.00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	81,162,800.00
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	7,546,000.00
5 Reklasifikasi	3,766,400.00
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	11,312,400.00
Jumlah mutasi bersih	69,850,400.00
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	3,112,906,403.00

C.3 Gedung dan Bangunan Rp2.443.728.761,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain



bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2020 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca tercatat sebesar Rp2.343.561.761,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai Gedung dan Bangunan tersebut naik menjadi Rp2.443.728.761,00. Terdapat Adanya Mutasi Keluar dari Belanja Modal berupa bangunan gedung yang akan hibahkan ke Instansi vertikal sebesar Rp5.646.484.000 yang terdiri dari:

- Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Purwodadi berupa Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi sebesar Rp903.255.000 berdasarkan NPHD no 030/ 8043/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021
- Pembangunan Lapangan Tenis Kodim berupa Lapangan Tenis Kodim sebesar Rp882.115.000 berdasarkan NPHD no 030/7731/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021.
- Pembangunan Polsek (Pembangunan Gedung Mapolsek Geyer) berupa Gedung kantor polsek Geyer sebesar Rp2.023.080.000 berdasarkan NPHD no 030/8041/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- Pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwodadi berupa Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwodadi sebesar Rp899.186.000 berdasarkan NPHD no 030/7922/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021.
- Peningkatan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Purwodadi berupa Rumah Dinas Pengadilan Purwodadi sebesar Rp938.848.000 berdasarkan NPHD no 030/7923/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021.



Saldo awal (Neraca Th. 2020)	2,343,561,761.00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	5,374,153,000.00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	372,498,000.00
5 Reklasifikasi	924,864,000.00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	6,671,515,000.00
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	924,864,000.00
6. Koreksi pembukuan	5,646,484,000.00
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	6,571,348,000.00
Jumlah mutasi bersih	100,167,000.00
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	2,443,728,761.00

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp362.259.721.799,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2020 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca tercatat sebesar Rp424.629.530.188,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai



Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut naik menjadi Rp350.665.405.726,00.

- a. Adanya mutasi keluar dari belanja modal berupa bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang akan dihibahkan masyarakat sebesar Rp5.608.735.000,00. Terdiri dari 22 Desa di 13 Kecamatan yaitu:
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bago Kec. Kradenan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp284.443.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.7/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Boloh Kec. Toroh (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 240.400.000 berdasarkan NPHD no030/8494/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Curut Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 290.700.000 berdasarkan no030/8514/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dapurno Kec. Wirosari (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp 286.643.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.5/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gunung Tumpeng Kec. Karangrayung (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp292.227.000 berdasarkan NPHD no 030/8496/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Juworo Kec. Geyer (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.930.000 berdasarkan NPHD no 030/8502/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kebonagung Kec. Tegowanu (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp288.913.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.3/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Keyongan Kec. Gabus (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air,



jaringan perpipaan sebesar Rp326.652.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.9/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kramat Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp290.890.000 berdasarkan NPHD no 030/7561/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lemahputih Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.307.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Leyangan Kec. Penawangan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp290.700.000 berdasarkan NPHD no 030/8512/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggarwetan Kec. Godong (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp293.080.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.13/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pahesan Kec. Godong (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.080.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.11/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pojok Kec. Tawangharjo (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.460.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.18/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Randurejo Kec. Pulokulon (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp333.200.000 berdasarkan NPHD no 030/8488/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sambirejo Kec. Wirosari (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.678.000 berdasarkan NPHD no 030/8516/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanjungsari Kec. Kradenan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp199.580.000 berdasarkan NPHD no 030/8492/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegalsumur Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air,



- jaringan perpipaan sebesar Rp292.700.000 berdasarkan NPHD no 030/8500/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Teguhan Kec. Grobogan (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.412.000 berdasarkan NPHD no030/8521/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Temon Kec. Brati (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.110.000 berdasarkan NPHD no 8520.9/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuko Kec. Pulokulon (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp293.519.000 berdasarkan NPHD no 030/8490/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tunggak Kec. Toroh (DAK Air Minum) berupa sumur dalam, menara air, jaringan perpipaan sebesar Rp201.111.000 berdasarkan NPHD no 030/8520.11/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- b. Adanya hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan nomor: 056.7/BA/DC/2021, 028/1383/2021 pada tanggal 22 September 2021 terdiri dari:
1. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp212.137.185,00.
 2. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp1.133.057.200,00
 3. Paket Peningkatan Kualitas Kumuh Kawasan Grobogan I di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi sebesar Rp2.015.950.338,00.

Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Saldo awal (Neraca Th. 2020)	350,665,405,726.00
Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1. Dari belanja	13,796,752,350.00
2. Dari Hibah	3,361,144,723.00
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	240,450,000.00
5 Reklasifikasi	8,056,171,350.00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	25,454,518,423.00
Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	8,056,171,350.00
6. Koreksi pembukuan	5,804,031,000.00
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	13,860,202,350.00
Jumlah mutasi bersih	11,594,316,073.00
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	362,259,721,799.00

C.5 Aset Tetap Lainnya..... Rp10.337.883.527,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2020 aset tetap lainnya pada neraca tercatat sebesar Rp10.337.883.527,00 sedangkan pada tahun 2021 nilai aset tetap lainnya tersebut naik menjadi Rp10.337.883.527. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Saldo awal (Neraca Th. 2020)	10,337,883,527.00
Penambahan Aset Tetap Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tetap Lainnya:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	10,337,883,527.00

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.7 Akumulasi Penyusutan Rp(205.517.090.840,42)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(175.512.141.663,21) sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp(175.512.141.663,21). Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas



penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat barang-barang *extracountable*, yaitu barang-barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang-barang *extracountable* per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.145.000 sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp316.342.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	Peralatan dan Mesin	69,145,000.00	69,145,000.00
2	Gedung dan Bangunan	-	8,695,000.00
3	Bangunan Monumen	-	
4	Aset Tetap Lainnya	-	238,502,000.00
	Jumlah	69,145,000.00	316,342,000.00

D. Dana Cadangan Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Dana Cadangan per 31 Desember 2021, karena SKPD tidak mengelola Dana Cadangan.

E. Aset Lainnya..... Rp99.869.000,00

Aset lainnya merupakan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp99.869.000,00 dan jumlahnya sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp99.869.000,00 berupa aset tidak berwujud sebagai berikut:



Aset Lainnya:	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	99,869,000.00	99,869,000.00
Aset Lain-lain	-	-
	<u>99,869,000.00</u>	<u>99,869,000.00</u>

1. Tagihan Penjualan Angsuran..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021.

2. Tuntutan Ganti Rugi..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga..... Rp0,00

Pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021.

4. Aset Tidak Berwujud..... Rp99.869.000,00

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk aset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh aset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik



masa manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.869.000,00 pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp99.869.000,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan tak berwujud sebagaimana tabel berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2020)	99,869,000.00
Penambahan Aset Tak Berwujud:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	99,869,000.00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	99,869,000.00
Pengurangan Aset Tak Berwujud:	
1 Penghapusan aset tetap	99,869,000.00
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	99,869,000.00
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2021)	99,869,000.00

5. Aset Lain-lain..... Rp0,00

Asset lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari



penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainRp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

F. Kewajiban Rp2.374.542,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.694.757,00. Kewajiban tersebut mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.374.542,00 yang terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban:</i>	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1 Kewajiban Jangka Pendek	2,374,542.00	9,694,757.00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	<u>2,374,542.00</u>	<u>9,694,757.00</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek..... Rp2.374.542,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp9.694.757,00 sedangkan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.374.542,00 yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-
b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
c Pendapatan diterima dimuka	-	-
d Utang Belanja	2,374,542.00	9,694,757.00
e Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<u>2,374,542.00</u>	<u>9,694,757.00</u>

a. U

tang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)..... Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tidak ada Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 maupun per 31 Desember 2021 yang merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga ataupun pajak yang dipotong dan masih ditahan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan.

b. Bagian Lancar Utang Jangka PanjangRp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Grobogan tidak ada utang jangka pendek per 31 Desember 2020 maupun per 31 Desember 2021.

c. Pendapatan Diterima Dimuka.....Rp0,00

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Grobogan tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 maupun per 31 Desember 2021.

d. Utang Beban..... Rp2.374.542,00

Jumlah Utang beban pada neraca tahun 2020 sebesar Rp2.374.542,00 telah dibayar semuanya pada tahun 2021 dan atas pembayaran tersebut tidak diperlakukan sebagai beban operasi tahun 2021. Akhir tahun 2021 utang beban yang terjadi di sebesar Rp505.200,00, terdiri dari Utang beban pegawai (Tunjangan Fungsional khusus bulan Desember) sebesar Rp1.869.342,00 dan utang beban (Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) sebesar Rp9.694.757,00.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya..... Rp0,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya pada neraca tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada neraca



per 31 Desember 2021 utang jangka pendek lainnya di sebesar Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang..... Rp0,00

Kewajiban jangka panjang-utang dalam negeri adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 2021 sebesar nihil.

G. Ekuitas..... Rp373.289.620.663,58

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca tahun 2020 sebesar Rp373.289.620.663,58 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp390.146.701.196. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 22 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 1 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 3 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 10 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 8 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	1	3	-	-	-	-	4
IV/a	-	-	-	4	-	-	-	4
Jumlah Gol. IV	-	1	3	4	-	-	-	8
III/d	-	-	-	1	-	-	1	2
III/c	-	-	-	3	-	-	1	4
III/b	-	-	-	1	-	-	1	2
III/a	-	-	-	-	-	1	1	2
Jumlah Gol. III	-	-	-	5	-	1	4	10
II/d	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	-	-	-	-	-	1	1
II/b	-	-	-	-	-	-	1	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	-	-	-	-	-	-	3	3
I/d	-	-	-	-	-	-	1	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah PNS	-	1	3	9	-	1	8	22

Sumber : BKD Kab. Grobogan



BAB V PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, IV, V dan VI, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp0,00 karena Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman tidak pengelola pendapatan.
2. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp33.492.794.765,00 lebih rendah Rp3.391.493.235.,00 atau 10,13 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp36.884.288.000,00.
3. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp33.492.794.765,00; maka terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp36.884.288.000,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp0,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00
4. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp2.198.065.602,86,00 dan Beban Operasional sebesar Rp53.927.068.817,07 sehingga diperoleh Defisit-LO sebesar Rp51.729.003.214,21.
5. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp390.146.701.196,80 Defisit-LO sebesar Rp51.729.003.214,21, Koreksi Piutang sebesar Rp0,00, Koreksi Aset Tetap sebesar Rp0,00, Koreksi Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp0, Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0,00 Koreksi Ekuitas SKPD Rp1.379.127.916,00 Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD sebesar Rp0,00, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp,00, Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp33.492.794.765,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp373.289.620.663,58.
6. Pada Neraca per 31 Desember 2021, jumlah Aset sebesar Rp373.184.750.205,58 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp390.048.152.953,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.863.402.747,42. Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp373.289.620.663,58.



Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2021 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Grobogan, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan



Drs. SISWANTO, MM
NIP. 1940618 199403 1 005